



MENGGUNAKAN MEKANISME LAIN Pemkot-Dewan: Santunan Kematian Dilanjutkan

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta menyepakati keberlanjutan program santunan kematian. Kedua lembaga pemerintahan tersebut kini mulai intensif mencari mekanisme penyaluran supaya tidak melanggar Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial.

Kesepakatan tersebut muncul dalam rapat koordinasi antara lintas instansi Pemkot Yogyakarta bersama Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Rabu (6/6) kemarin. "Intinya kita semua yang disini sudah sepakat jika santunan ini harus tetap berjalan. Sekarang kita rumuskan teknis penyaluran supaya tidak melanggar aturan yang ada," ungkap Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko.

Anggota Komisi D, Ardianto menambahkan, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh Pemkot. Antara lain pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta memasukkan dalam asuransi yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Dari berbagai alternatif tersebut, lanjut Ardianto, pemberian santunan kematian melalui asuransi lebih mudah untuk dilakukan. Pemkot juga tidak akan mengalami persoalan teknis lantaran program tersebut masuk dalam pos belanja langsung. "Kalau UPT dengan BLUD memang lebih rumit. Apalagi ini sudah mau pembahasan APBD Perubahan. Harapan kita kan setelah APBD Perubahan nanti sudah ada kejelasan. Sehingga mekanisme asuransi lebih memungkinkan," terangnya. **(M-6)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005